

## KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG DALAM MEMBIYAI KEGIATAN PEREKONOMIAN

**Adi Rizfal Efriadi**

STIE Ahmad Dahlan Jakarta

Jl. Ciputat Raya No. 77 Cireundeu,

Jakarta Selatan

Email: [adirizfal2009@yahoo.co.id](mailto:adirizfal2009@yahoo.co.id)

### **Abstract**

*This research analyzes trends of APBD Kota Tangerang and financial performance of Pemerintah Kota Tangerang. This research used descriptive and qualitative method where 1992-2008 was observed. 1992-1999 is assumed that the year is before autonomy implementation and the year of 2001-2008 is after autonomy implementation policy. Time of research is December 2010-April 2011. The results showed that financial performance of Pemerintah Kota Tangerang is lower compared before autonomy implementation. The average of it is 1.17%. Differently, the index during autonomy policy raised 0.67%. The result of this research becomes the indication that Pemerintah Kota Tangerang has not yet fully independent in financial management as an effort of economic improvements.*

Kata Kunci: otonomi daerah, desentralisasi, kemandirian keuangan

### **LATAR BELAKANG**

Implikasi dari UU. No. 33/2004 tersebut memiliki konsekuensi yaitu kewenangan untuk mengelola keuangan (*expenditure*) secara mandiri. Desentralisasi keuangan dalam prakteknya terdiri dari beberapa bentuk, termasuk (a) pendanaan mandiri; (b) menjalin kerjasama pendanaan dengan pihak swasta dalam penyediaan pelayanan dan infrastruktur; (c) ekspansi sumber pendapatan daerah melalui berbagai retribusi; (d) dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat dan (e) utang luar negeri.

Dengan adanya kewenangan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dapat meresponnya dalam dua hal yaitu: (a) lebih memusatkan perhatian pada usaha memperbesar penerimaan melalui intensifikasi dan perluasan pajak, retribusi daerah serta memanfaatkan

sumber daya yang belum optimal melalui bagi hasil dan peningkatan dana transfer; dan (b) lebih berorientasi pada efektifitas pengeluaran yaitu merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan serta program pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

Sejalan dengan adanya desentralisasi fiskal, akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.

Kota Tangerang adalah daerah otonom yang ditetapkan sebagai kotamadya sesuai dengan UU/ No. 2/1993 tentang Pembentukan Kotamadya Tangerang pada tanggal 27 Februari 1993. Kota Tangerang merupakan salah satu kota terbesar dan terpenting di Provinsi Banten. Terbesar karena Kota Tangerang merupakan kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Menurut BPS Kota Tangerang, dari tahun 2000-2007, Kota Tangerang terus mengalami pertumbuhan penduduk, dari 1.311.746 jiwa pada tahun 2000 menjadi 1.575.140 pada tahun 2007 (BPS Kota Tangerang, 2007).

Total nilai investasi Kota Tangerang pada periode tahun 2000-2005 mengalami kecenderungan meningkat. Periode peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2005, dengan total investasi sebesar Rp. 777.722.017.000,-. Hingga April 2008, nilai total investasi yang ada di Kota Tangerang mencapai Rp. 140.521.181.000 (Baseline Economic Surveys, BI, 2008).

Melihat dan membaca kondisi ekonomi Kota Tangerang tersebut tentu memunculkan dugaan tingginya penerimaan, khususnya pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tangerang. Namun demikian, ukuran pendapatan asli daerah ini bukan merupakan ukuran utama untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Lebih dari itu, kinerja keuangan daerah mencerminkan arah dan pencapaian kebijakan fiskal dalam mendorong pembangunan daerah secara umum dan menggambarkan sejauhmana pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diembankan pada pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi fiskal dilaksanakan.

Selain itu, arah atau kecenderungan kinerja keuangan pemerintah daerah juga menjadi penting terkait dengan bagaimana perencanaan APBD dilakukan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dituntut untuk dapat melakukan proyeksi dan estimasi terhadap R-APBD yang mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya aspek efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

## TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis kecenderungan (*trends*) APBD Kota Tangerang.
2. Menganalisis kemandirian keuangan daerah Kota Tangerang dalam membiayai kegiatan perekonomiannya.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Desentralisasi Fiskal

Dalam UU. No. 32/2004 disebutkan: “perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dokonsentrasi dan tugas pembantuan.

Menurut Tadjoeeddin (2005), dalam desentralisasi fiskal, transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Pada dasarnya transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat dibedakan atas bagi hasil pendapatan dan bantuan. Adapun tujuan transfer ini adalah pemerataan vertikal dan pemerataan horizontal, mengatasi efek pelayanan publik, mengarahkan prioritas dan melakukan eksperimen dengan ide-ide baru, stabilitas dan kewajiban untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum (SPM) di setiap daerah.

### 2. Konsep Anggaran Keuangan Daerah

Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta yang relatif kecil nuansa politisnya. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran

sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan keuangan publik. Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi: (a) aspek perencanaan; (b) aspek pengendalian; dan (c) aspek akuntabilitas publik.

### 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan UU. No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah "APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah".

### 4. Pendapatan Daerah

Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva dan penurunan aktiva utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Secara umum pendapatan dalam APBD dikelompokkan menjadi tiga kelompok: (a) Pendapatan Asli Daerah; (b) Dana Perimbangan dan (c) lain-lain pendapatan yang sah.

### 5. Belanja Daerah

Belanja adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Secara umum Belanja dalam APBD dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu: (a) belanja administrasi umum; (b) belanja operasi, pemeliharaan sarana; (c) belanja modal; (d) belanja transfer; (e) belanja tidak terduga.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah data-data Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang dari

tahun 1992-2008. Tahun 1992-1999 adalah tahun sebelum dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah dan tahun 2001-2008 adalah tahun dimana kebijakan otonomi telah dilaksanakan. Sumber data berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kota Tangerang. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan berdasarkan pada pencarian, pemilihan, pencatatan dan pengkategorian data.

Teknik analisis data menggunakan 2 pendekatan: (1) analisis kecenderungan; (2) Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (IKKPD). Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (IKKPD) terdiri dari 4 indikator, yaitu:

#### 1. Ketergantungan Fiskal (*Fiscal Dependency Index/FIDI*)

Indikator ini dirumuskan sebagai persentase dari DAU (yang sudah dikurangi Belanja Pegawai) dalam Total Pendapatan anggaran daerah. Ketergantungan fiskal ini digunakan untuk mengukur sejauh mana Pemerintah Kota Tangerang dapat memenuhi kebutuhan fiskalnya untuk membiayai pembangunan, baik melalui alokasi dana perimbangan dari pusat (DAU) maupun maupun dari pendapatan asli daerah (PAD). Ketergantungan fiskal dapat dicari dengan rumus:

$$\frac{\text{DAU - Belanja Pegawai}}{\text{Total Pendapatan}}$$

#### 2. Kapasitas Penciptaan Pendapatan (*Fiscal Government Income Index/FGII*)

Proporsi PAD tidak dinyatakan dalam total nilai APBD, namun dinyatakan sebagai persentase dari PDRB kabupaten/kota. Hal ini diperlukan untuk menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan kapasitas penciptaan pendapatan (*income generation*). Rumus:

$$\frac{PAD}{PDRB \text{ Kab/Kota}}$$

### 3. Proporsi Belanja Modal (*Fiscal Capital Expenditure Index/ FCAPEXI*)

Indikator ini menunjukkan arah pengelolaan belanja pemerintah pada manfaat jangka panjang, sehingga memberikan efek ganda (*multiplier*) yang lebih besar terhadap perekonomian. Belanja modal digunakan untuk membangun sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung sekolah, rumah sakit, dan pembangunan fisik lainnya, termasuk juga sarana dan prasarana pemerintahan. Indikator ini dirumuskan sebagai persentase dari Belanja Modal dalam Total Belanja pada anggaran daerah, dengan rumus:

$$\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

### 4. Kontribusi Sektor Pemerintah (*Fiscal Consumption Expenditure Index/ FCEI*)

Indikator ini menunjukkan kontribusi pemerintah dalam menggerakkan perekonomian. Peran anggaran pemerintah tidak saja ditunjukkan oleh belanja modal yang bersifat investasi dalam jangka panjang, tetapi juga dalam jangka pendek seperti ditunjukkan oleh belanja gaji (belanja pegawai) dan belanja yang digunakan untuk pelayanan publik. Belanja ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran konsumsi. Nilainya dinyatakan sebagai persentase Total Belanja Pemerintah dalam PDRB Kota Tangerang.

$$\frac{\text{Total Belanja}}{\text{PDRB}}$$

Untuk mengetahui secara komprehensif kinerja keuangan daerah, maka Indeks Kinerja Keuangan Daerah (IKKPD) adalah sebagai berikut:

$$IKKPD_t = \frac{((100 - FIDI_t) + FGII_t + FCAPEXI_t + FCEI_t)}{4}$$

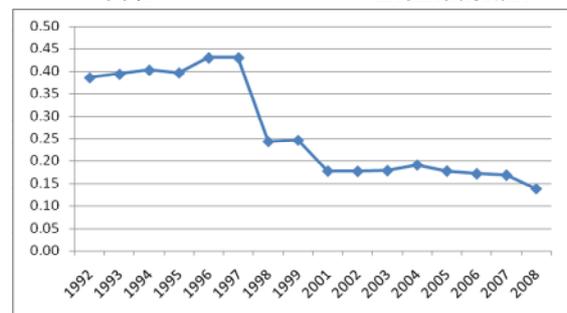
## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Ketergantungan Fiskal (FIDI)

Secara grafis, indeks ketergantungan fikal (*fiscal dependency index/ FIDI*) Pemerintah Kota Tangerang baik pada pra-otonomi daerah maupun setelah diberlakukannya otonomi daerah tampak dalam gambar di bawah ini. Dari gambar tersebut terlihat bahwa terdapat kecenderungan peningkatan ketergantungan fiskal Pemerintah Kota Tangerang terhadap Pemerintah Pusat, terutama pada setelah diberlakukannya otonomi. Pada gambar terlihat, indeks ketergantungan fiskal Pemerintah Kota Tangerang lebih rendah jika dibandingkan pada sebelum otonomi diberlakukan.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan fiskal Pemerintah Kota Tangerang terhadap pemerintah pusat digunakan derajat desentralisasi fiskal yang dibuat oleh Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri dan Fisipol UGM (1991) sebagai berikut:

|             |               |
|-------------|---------------|
| 0,00% - 10% | sangat kurang |
| 10,1%-20%   | kurang        |
| 20,1%-30%   | cukup         |
| 30,1%-40%   | baik          |
| 40,1%-50%   | sangat baik   |
| >50%        | memuaskan     |



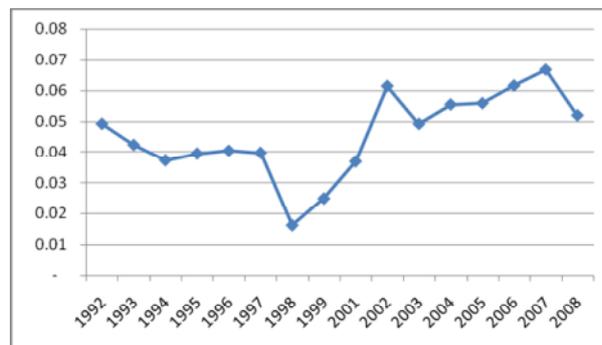
Sumber: Data diolah

Gambar 1  
Ketergantungan Fiskal Kota Tangerang Pra dan Pasca-Otonomi Daerah

## 2. Kapasitas Penciptaan Pendapatan (FGII)

Kapasitas Penciptaan Pendapatan (FGII) diperlukan untuk menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan kapasitas penciptaan pendapatan (*income generation*). Kapasitas Penciptaan Pendapatan (FGII) dinyatakan sebagai rasio antara PAD dengan PDRB. Rasio ini hendak mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dari sisi pendapatan secara makro. Sering pula disebut indikator *tax effort*, indikator ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah menciptakan pendapatan (*generating income*) berdasarkan kapasitas dan potensi lingkungan ekonomi di daerah. Tabel di bawah ini menggambarkan PAD dan PDRB Kota Tangerang tahun 1992-1999 (pra-otonomi daerah) dan 2001-2008 (pasca-otonomi daerah).

Berdasarkan perhitungan, terjadi peningkatan kapasitas penciptaan pendapatan oleh Pemerintah Kota Tangerang jika dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya otonomi daerah. Kuat dugaan, peningkatan kapasitas penciptaan pendapatan ini diakibatkan oleh kewenangan pengelolaan potensi ekonomi (pajak, retribusi dan lain sebagainya) di Kota Tangerang sebagai implikasi dari UU. No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU. No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. Namun demikian, proporsi kapasitas penciptaan pendapatan ini tampaknya masih lebih banyak disumbang oleh pos pajak dan retribusi. Tercatat dari tahun 2001-2007, rasio pos pajak daerah dan retribusi terhadap total PAD di Kota Tangerang rata-rata mencapai 84,6% dari total PAD. Ilustrasi tabel tentang kondisi penerimaan pajak sebagaimana tergambar dalam tabel 1 di bawah ini.



Sumber: Data diolah

Gambar 2  
Kapasitas Penciptaan Pendapatan Kota  
Tangerang  
Pra dan Pasca-Otonomi Daerah

Tabel 1  
Rasio Pos Pajak dan Retribusi Terhadap Total PAD  
Kota Tangerang Tahun 2001-2007  
(dalam milyar rupiah)

| Tahun | Keterangan       |                      |                |                          | Total PAD | Pos Pajak + Retribusi | Rasio Pos Pajak dan Retribusi Thd Total PAD |
|-------|------------------|----------------------|----------------|--------------------------|-----------|-----------------------|---|
|       | Pos Pajak Daerah | Pos Retribusi Daerah | Pos Laba BUM D | Pos Lain-Lain Pendapatan |           |                       |   |
| 2001  | 35,389           | 10,782               | 515            | 15,085                   | 61,771    | 46,171                | 0.74  |
| 2002  | 45,963           | 16,985               | 669            | 19,725                   | 83,342    | 62,948                | 0.75  |
| 2003  | 56,210           | 24,150               | 820            | 12,201                   | 93,381    | 80,360                | 0.86  |
| 2004  | 77,902           | 24,438               | 1,560          | 5,734                    | 109,634   | 102,340               | 0.93  |
| 2005  | 80,257           | 24,827               | 3,267          | 9,061                    | 117,412   | 105,084               | 0.89  |
| 2006  | 92,156           | 22,155               | 5,287          | 12,258                   | 131,856   | 114,311               | 0.86  |
| 2007  | 109,607          | 25,883               | 13,727         | 7,304                    | 156,521   | 135,490               | 0.86  |
| 2008  | -                | -                    | -              | -                        | -         | -                     | -   |

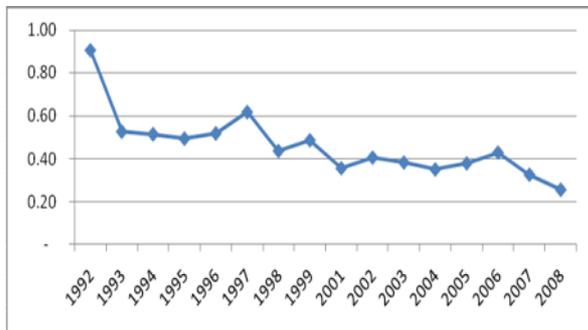
Sumber: Dispenda Kota Tangerang

## 3. Proporsi Belanja Modal (FCAPEXI)

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD), belanja modal merupakan belanja pemerintah yang mencakup sektor-sektor antara lain: pendidikan, kesehatan, irigasi, jalan, perumahan dan infrastruktur lainnya. Dalam perspektif UU. No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, belanja modal ini tentu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah. Dengan kata lain, belanja modal tersebut merupakan investasi publik.

Oleh karena itu, investasi yang dilaksanakan pemerintah daerah melalui belanja modal berkontribusi terhadap perekonomian regional. Kontribusi ini berlangsung dalam dua tahap: yaitu jangka pendek melalui belanja material dan penyerapan tenaga kerja dan dalam jangka panjang melalui angka pengganda (*multiplier*) pada pihak swasta yang turut berperan dalam perekonomian daerah.

Melihat tujuan tersebut, maka belanja modal yang mencakup sektor-sektor sebagaimana disebut di atas sedapat mungkin dilakukan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Membaca hasil pengolahan data BPS Kota Tangerang, terdapat kecenderungan proporsi belanja modal ini menurun selama pelaksanaan otonomi daerah jika dibandingkan dengan sebelum pelaksanaan otonomi daerah. Setelah pelaksanaan otonomi, belanja modal ini tidak sampai mencapai 50% dari total belanja Pemerintah Kota Tangerang pada tahun yang diobservasi.



Sumber: Data diolah

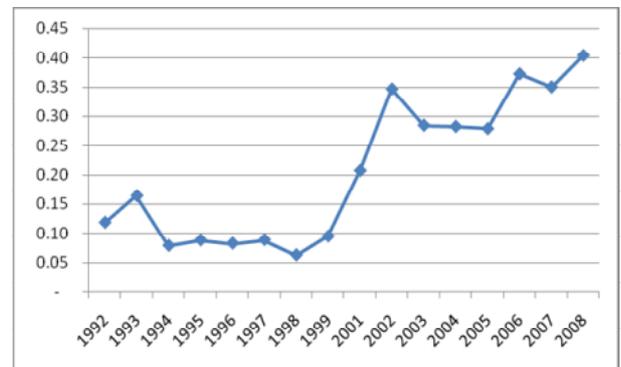
Gambar 3

Capital Expenditure Kota Tangerang Pra-otonomi dan Pasca-otonomi

#### 4. Kontribusi Sektor Pemerintah (FCEI)

Jika belanja modal merupakan belanja yang bersifat investasi jangka panjang, maka kontribusi sektor pemerintah (FCEI) melalui belanja pegawai (belanja gaji) dan belanja yang digunakan untuk pelayanan publik adalah bersifat jangka pendek. Belanja ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran konsumsi pemerintah daerah.

Hasil perhitungan menunjukkan, rata-rata kontribusi sektor pemerintah terhadap PDRB sebelum pelaksanaan otonomi hanya mencapai 10%. Sementara selama pelaksanaan otonomi daerah, kontribusinya mencapai 32% terhadap PDRB. Data ini juga menggambarkan bahwa kontribusi sektor pemerintah terhadap kegiatan perekonomian di Kota Tangerang relatif besar.

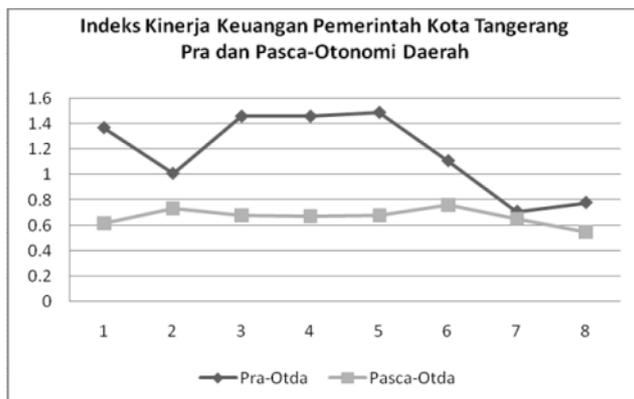


Sumber: Data diolah

Gambar 3

Kontribusi Sektor Pemerintah Kota Tangerang Pra-otonomi dan Pasca-otonomi

Keempat indikator kinerja keuangan daerah tersebut dirangkum menjadi satu indeks kinerja keuangan pemerintah daerah (IKKPD). Dari hasil perhitungan, indeks kinerja keuangan Pemerintah Kota Tangerang lebih rendah jika dibandingkan dengan sebelum pelaksanaan otonomi daerah. Rata-rata indeks kinerja sebelum otonomi mencapai 1,17% sementara selama pelaksanaan otonomi hanya mencapai 0,67%. Hasil perhitungan ini menjadi indikasi bahwa Pemerintah Kota Tangerang belum sepenuhnya mandiri dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya peningkatan perekonomian di Kota Tangerang.



Gambar 4  
Indeks Kinerja Keuangan Pemkot Tangerang

Tujuan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi adalah agar daerah lebih mandiri dalam pengelolaan keuangannya. Semakin mandiri suatu daerah berarti semakin mampu daerah tersebut membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Di Kota Tangerang, khususnya pasca-pelaksanaan kebijakan otonomi dan desentralisasi, terdapat kecenderungan bahwa Pemerintah Kota Tangerang semakin tergantung pada pemerintah pusat. PAD yang menjadi tumpuan dalam mendorong kemandirian fiskal belum mampu menjadikan Kota Tangerang lepas dari ketergantungan dari Pemerintah Pusat.

Melihat konstataasi ini, untuk mengurangi ketergantungan pada dana dari Pemerintah Pusat, Kota Tangerang perlu menelusuri upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas finansialnya dengan mengembangkan basis pajak, meningkatkan pengumpulan pajak dan retribusi, merasionalisasi pengeluaran, mempromosikan iklim investasi yang kondusif dalam kerangka kemitraan swasta-pemerintah dan menggunakan lahan yang ada untuk dapat digunakan semaksimal mungkin. Namun demikian, yang patut menjadi perhatian adalah pemungutan pajak dan retribusi yang ekspansif justru jangan kontraproduktif dengan upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Sebab, pemungutan pajak dan retribusi yang ekspansif dapat meningkatkan biaya ekonomi tinggi (*high cost economy*) bagi swasta yang ingin melakukan investasi.

Kapasitas penciptaan pendapatan yang tinggi tentu memberi peluang bagi Kota Tangerang untuk dapat membiayai pembangunannya, termasuk belanja rutin dan belanja pembangunan. Dalam UU. No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa belanja modal bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah. Melihat tujuannya tersebut, maka belanja modal diarahkan pada pembiayaan pembangunan di daerah. Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Dalam penelitiannya Holtz-Eakin et al (1994) menyatakan terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Pada studi yang dilakukan oleh Legrenzi & Milas (2001) dalam Halim (2004) menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Prakoso (2004) memperoleh temuan empiris yang sama yang menunjukkan bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Hasil penelitian Susilo dan Adi (2007) semakin memperkuat kecenderungan ini. Mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi.

Hasil perhitungan menunjukkan, belanja modal pada Pemerintah Kota Tangerang cenderung menurun selama pelaksanaan otonomi daerah. Setelah pelaksanaan otonomi, belanja modal ini tidak sampai mencapai 50%

dari total belanja Pemerintah Kota Tangerang. Menurut Abimanyu (2005), anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin.

Kecenderungan ini tentu paralel dengan tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Tangerang terhadap dana Pemerintah Pusat. Menurut Mudrajad Kuncoro (2004), ada lima penyebab tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, yaitu sebagai berikut: (1) kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan; (2) tingginya derajat sentralisasi dibidang perpajakan. Pajak yang produktif baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung ditarik oleh pusat. Pajak penghasilan badan atau perorangan (termasuk migas) seperti pajak pertambahan nilai, bea cukai, PBB, royalti/IHH/IHPH (atas minyak, pertambangan, kehutanan) semua dikelola administrasi dan ditentukan tarifnya oleh pusat. Alasan sentralisasi perpajakan sering dikemukakan sebagai upaya mengurangi disparitas antar daerah, efisiensi administrasi dan keseragaman perpajakan; (3) kendati pajak daerah cukup beragam ternyata hanya sedikit yang bias diandalkan sebagai sumber penerimaan; (4) adanya kekhawatiran apabila daerah memiliki sumber keuangan yang tinggi maka ada kecenderungan terjadi disintegrasi dan separatisme; (5) kelemahan dalam pemberian subsidi.

Oleh sebab itu, pendapatan asli daerah seyogyanya dapat menjadi instrumen bagi peningkatan belanja pembangunan. Kerangka kebijakan dalam hal merasionalisasi pengeluaran rutin, menciptakan iklim investasi yang kondusif serta melakukan upaya-upaya peningkatan pajak dan retribusi menjadi strategi simultan yang harus dipertimbangkan. Selain itu, tindakan-tindakan yang memberi peluang terjadinya korupsi seyogyanya harus dapat diminimalisasi. Dalam konteks itulah diperlukan upaya kontrol dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan.

Melihat kondisi riil yang ada, kuat dugaan terjadi *vicious circle* antara keuangan pemerintah dan perekonomian daerah. Sebagai daerah otonom, Kota Tangerang memerlukan peran nyata pemerintah yang cukup besar untuk mendorong perekonomian. Tidak saja melalui pembangunan infrastruktur fisik tetapi kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah yang dapat mendorong berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Peran yang kurang memadai dari keuangan daerah menyebabkan perekonomian yang kurang berkembang yang pada gilirannya juga berdampak pada kurang optimalnya pendapatan daerah yang dapat mendorong kemandirian fiskal. Oleh karena itu, hal ini menjadi satu indikasi belum efektifnya kebijakan keuangan pemerintah daerah dalam menggerakkan aktifitas ekonomi di daerah baik yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat investasi.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa butir kesimpulan, antara lain:

1. Pada beberapa aspek, kinerja keuangan Pemerintah Kota Tangerang menunjukkan trend yang semakin baik. Hal tersebut terlihat pada beberapa indikator kinerja keuangan daerah.
2. Keempat indikator di atas dirangkum menjadi satu indeks, yaitu indeks kinerja keuangan pemerintah daerah (IKKPD). indeks kinerja keuangan Pemerintah Kota Tangerang lebih rendah jika dibandingkan dengan sebelum pelaksanaan otonomi daerah. Rata-rata indeks kinerja sebelum otonomi mencapai 1,17% sementara selama pelaksanaan otonomi hanya mencapai 0,67%. Hasil perhitungan ini menjadi indikasi bahwa Pemerintah Kota Tangerang belum sepenuhnya mandiri dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya peningkatan perekonomian di Kota Tangerang.

Penelitian ini menimbulkan implikasi penting, diantaranya:

1. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah Kota Tangerang juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor - sektor yang produktif di Kota Tangerang.
2. Pemerintah Kota Tangerang hendaknya terus mengupayakan kebijakan otonomi daerah yang bersifat ekspansif terutama disektor PAD. Penggalan sumber-sumber daerah yang berpotensi untuk meningkatkan penerimaan daerah terus dilaksanakan sehingga dapat mengurangi ketergantungan sumber keuangan daerah yang berasal dari pemerintah pusat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggawirya, E., 2000, *Analisa Laporan Keuangan*, cet. Ke-1. PT Ercontara Rajawali, Jakarta
- Arsyad, L., 1999, *Ekonomi Pembangunan*. STIE YKPN, Yogyakarta
- Bappenas, 2003. *Peta Kemampuan Daerah Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya Yang Dilakukan Daerah*, Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah
- Bastian, I., 2002, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, buku I, cet. Ke-1. Salemba 4 Jakarta
- Halim, A. 2002, *Akuntansi Sektor Publik - Akuntansi Keuangan Daerah*, cet. Ke-1. Jakarta
- , 2004, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- IAI, 2002, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta
- Ichimura, Shinichi, 1989, *Ekonomi Pembangunan Indonesia "Masalah Dan Analisis"*. Jakarta
- IKAPI. 2005, *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Fokus Media, Bandung
- Kuncoro, M., 2004, *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategis dan Peluang*. Erlangga, Jakarta
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Jakarta.
- Nainggolan P., 2004, *Cara Mudah Memahami Akuntansi*, Penerbit PPM Jakarta.
- Radianto, E., 1997, *Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II suatu Studi di Maluku*, Prisma Vol.3.
- Siregar, B. dan Siregar B., 2001, *Akuntansi Pemerintahan Dengan Sistem Dana*. Edisi ke 3, STIE YKPN.,Yogyakarta
- Sugiyono, 2002, *Statistika untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung
- Susilo, G.T., dan Adi, P.H., 2007, *Analisis Kinerja Keuangan APBD Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris di Propinsi Jawa Tengah)*, Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama, Surabaya
- Tjokroamidyoyo, B., 1995, *Perencanaan Pembangunan*. PT Gunung Agung
- Yujana, L.H., 1992, *Akuntansi Pemerintahan Mencakup Sistem Akuntansi Pemerintah Indonesia Dan Mekanisme Pembukuan Bendaharawan - Sistem Baru*, cet. Ke-4. BPFE UI, Jakarta

Situs Internet:

[www.undp.or.id](http://www.undp.or.id)

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

[www.kotatangerang.go.id](http://www.kotatangerang.go.id)